

# PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAI PROGRAM PEMBERDAYAAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI

Mochamad Rangga Septiyadi

*Corresponding Author*

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

[rangga.septyadi@gmail.com](mailto:rangga.septyadi@gmail.com)

Ety Rahayu

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

## **ABSTRAK**

*Sesuai perkiraan, Indonesia mengalami bonus demografi dan dimulai pada tahun 2020 yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang lebih besar dari kelompok penduduk lainnya. Atas hal ini, perlu dilakukan upaya mendasar dalam memastikan bonus demografi dapat menjadi pendorong denyut ekonomi dan bukan sebaliknya. Pada awal tahun 2020, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja. Program ini diluncurkan di tengah datangnya pandemi Covid-19 yang mengganggu banyak aspek dalam masyarakat, utamanya ekonomi dan kesehatan. Penelitian ini mengkaji program Kartu Prakerja dari sudut pandang konsep pemberdayaan. Penelitian dilakukan dengan menelusuri kebijakan dan regulasi pemerintah dalam menjalankan program ini. Hasil penelitian menemukan bahwa program Kartu Prakerja berusaha menerapkan tujuan pemberdayaan dalam pelaksanaan program sebagai karena berupaya untuk membangun kekuatan diri peserta untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi (bekerja maupun wirausaha). Program ini mengembangkan 2 dari 3 strategi pemberdayaan yang disebut Jim Ife yakni melalui kebijakan dan perencanaan untuk menghadirkan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat serta pendidikan dan peningkatan kesadaran untuk meningkatkan kekuatan pada subjek pemberdayaan.*

**KATA KUNCI:** *Pandemi Covid-19, Pemberdayaan, Program Kartu Prakerja*

## **ABSTRACT**

*As predicted, Indonesia will experience a demographic bonus, starting in 2020 as indicated by the population of productive citizens group (15-64 years) which is larger than other population groups. In response to the situation, fundamental efforts need to be made to ensure that the demographic surplus can be an economic driver. In early 2020, the government launched the Pre-employment Card program. This program was launched in the midst of the Covid-19 pandemic which disrupted many aspects of society, especially the economy and health. This research examines the Pre-employment Card program from the point of view of the empowerment concept. Research is carried out by tracing government policies and regulations in carrying out this program. The results of the study found that the Pre-employment Card program seeks to implement empowerment goals as it seeks to build the strength of participants to engage in economic activities (work and entrepreneurship). The program develops 2 of 3 empowerment strategies by Jim Ife through policy and planning to provide fairer access to resources and opportunities to participate in community life as well as education and awareness raising to increase strength of the subject of empowerment.*

**KEY WORDS:** *Covid-19 Pandemic, Empowerment, Pre-Employment Card Program*

## PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan penyebaran virus penyakit Covid-19 yang merebak dengan cepat. Diawali oleh penyebaran virus di kota Wuhan, Cina, lalu menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. World Health Organization (WHO) lalu menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. 2 warga Depok yang baru saja pulang dari Jepang diduga menjadi *carrier* atau pembawa virus pertama Covid-19 (Abdillah, 2020, dalam Hayati, H. N., & Yoedtadi, M. G. 2020).

Catatan Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020) menyebut beragam dampak pandemi. Pandemi menghantam perekonomian banyak negara termasuk Indonesia, khususnya sektor pariwisata, perdagangan, serta investasi. Badan Pusat Statistik merilis data penurunan ekspor migas Indonesia, salah satu sebabnya karena Cina adalah importir terbesar migas Indonesia. Pandemi juga menyebabkan turunnya produksi sentral barang dunia yang terpusat di Cina. Dunia mengalami krisis rantai pasok akibat penurunan produksi di Cina. Kondisi ini menyebabkan investor menahan diri sebagai akibat dari ketidakpastian rantai pasok. Di lain sisi, bisnis di industri penerbangan juga terjun bebas. Banyak maskapai yang membatalkan penerbangan atau penumpang membatalkan rencana perjalanan. Pembatasan penerbangan juga dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia, Australia, Cina, Rusia, Singapura, Italia, dan negara lain.

Di sisi lain, pandemi datang saat Indonesia sedang berada pada tonggak capaian ekonomi yang sangat penting. Sensus Badan Pusat Statistik menunjukkan Indonesia telah berada pada situasi bonus demografi. Jumlah usia produktif (15-64 tahun) saat ini mencapai 70,7%. Kondisi ini diperhitungkan akan terus bertahan sampai 2 dekade ke depan. Postur ini sesungguhnya dapat menjadi peluang atau ancaman. Ancaman akan muncul ketika pasar tenaga kerja yang tersedia pada saat itu tidak dapat memenuhi kebutuhan giat ekonomi, baik sama sekali tidak dapat diterima pasar (menjadi pengangguran) atau kalah bersaing dengan tenaga kerja asing dalam mencapai posisi strategis organisasi/perusahaan.

Pidato Presiden tanggal 16 Agustus 2019 pada penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya menyatakan bahwa salah satu kunci untuk memajukan Indonesia adalah dengan cara meningkatkan daya saing nasional yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia (SDM).<sup>1</sup> Hal tersebut juga tercermin dari tema kebijakan fiskal tahun 2020 yaitu “APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia.” Pemerintah telah mengeluarkan program Kartu Prakerja untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dengan alokasi anggaran 8 sampai 10 triliun Rupiah. Pemerintah berharap melalui Kartu Prakerja dapat mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang berkualitas untuk menghadapi pasar kerja di Indonesia. Latar belakang program Kartu Prakerja ini disebabkan oleh berbagai kondisi (Nota Keuangan RAPBN, 2020), diantaranya: pertama, kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang 63 persen lulusan pendidikan formalnya tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; kedua, revolusi industri 4.0 yang akan menghasilkan gap antara kompetensi tenaga kerja saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan di masa mendatang; dan ketiga,

---

<sup>1</sup> <https://setkab.go.id/pidato-presiden-joko-widodo-pada-penyampaian-keterangan-pemerintah-atas-rancangan-undang-undang-tentang-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-apbn-tahun-anggaran-2020-beserta-nota-keuangannya-di-de/> diakses pada 16 Juni 2021 pukul 16.50

bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia pada tahun 2030-2040.

Kartu Prakerja merupakan salah satu bagian dari janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk diwujudkan selama periode pemerintahan 2019-2024. Kartu Prakerja bertujuan untuk (i) mengembangkan kompetensi angkatan kerja dan (ii) meningkatkan produktivitas serta daya saing angkatan kerja. Program ini menarget (i) pencari kerja, (ii) pekerja yang terkena PHK, dan (iii) pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi sebagai sasaran program (Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, 2020).

Lahir pada era pandemi Covid-19, Kartu Prakerja juga menjadi salah satu program Jaring Pengaman Sosial yang amat diandalkan, bersanding dengan 6 program lainnya yakni Program Keluarga Harapan, BLT Desa, Sembako, Bantuan Subsidi Upah, Insentif Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta subsidi listrik (Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R., 2020). Total anggaran Jaring Pengaman Sosial di masa pandemi pada tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp110 triliun, dari total Rp405,1 triliun anggaran stimulus ekonomi menyikapi dampak penyebaran Covid-19. Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk masing-masing program seiring dengan meningkatnya rumah tangga miskin sebagai dampak dari berkurangnya aktivitas ekonomi akibat pandemi yang terjadi.

Tabel 1. Daftar Program Jaring Pengaman Sosial di Masa Pandemi Covid-19

No.	Program	Bentuk bantuan	Detil Bantuan	Target
1	Program Keluarga Harapan	<i>Cash transfer</i>	Tunai, beragam sesuai kriteria	10 juta Keluarga Penerima Manfaat
2	Bantuan Langsung Tunai - Desa	<i>Cash transfer</i>	Tunai, selama 3 bulan	Bukan penerima PKH dan sembako
3	Kartu Prakerja	<i>Cash transfer</i>	Pelatihan dan insentif	5,6 juta penerima pada 2020
4	Bantuan Subsidi Upah	<i>Cash transfer</i>	Jumlah 400,000 penerima	Selain penerima Kartu Prakerja
5	Sembako	<i>In-kind</i>	Rp200,000/keluarga	20 juta penerima
6	Insentif Perumahan	<i>In-kind</i>	Subsidi bunga KPR	175,000 unit rumah
7	Subsidi Listrik	<i>In-kind</i>	Token listrik gratis dan subsidi	Pengguna listrik 450VA dan 900VA

Sumber: CSIS Commentaries ECON-002-ID, dengan olahan peneliti

Adapun urgensi yang mendorong pemerintah untuk melaksanakan program Kartu Prakerja karena dilatarbelakangi oleh masalah ketenagakerjaan di Indonesia yaitu: pertama, menurut data BPS, jumlah angkatan kerja hingga Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta orang dibanding Februari 2018. Namun, karakteristik penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan masih didominasi oleh tingkat pendidikan yang rendah yaitu pendidikan SD ke bawah sebesar 52,40 juta (40,51 persen) lalu diikuti oleh tingkat pendidikan lainnya. Data tersebut memperlihatkan bahwa tingginya jumlah angkatan kerja di Indonesia masih ditopang oleh tingkat pendidikan yang rendah. Apabila kondisi ini tidak dapat segera ditangani oleh pemerintah maka Indonesia akan didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Rendahnya pendidikan akan berdampak pada kualitas SDM itu sendiri di mana kualitas yang rendah akan sejalan dengan ketidakmampuan SDM dalam persaingan global. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia dapat dilihat dari data Asian Productivity Organization (APO), tingkat produktivitas pekerja di Indonesia masih berada di negara-negara ASEAN seperti Brunei, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kedua, masalah pengangguran. Menurut data BPS, tingkat pengangguran Indonesia hingga Februari 2019 berkurang sebanyak 50 ribu orang, hal ini sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 5,01 persen. Namun, yang menjadi persoalan adalah TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,63 persen. Ketiga, kondisi lapangan kerja. Menurut data BPS, Hingga Februari 2019 persentase lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja hanya terdapat pada penyediaan transportasi, akomodasi makan dan minum serta industri pengolahan. Namun, sektor pertanian yang selama ini merupakan salah satu lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja hingga 38,11 juta orang (29,46 persen) bersama dengan kehutanan dan perikanan menurun sebesar 1,00 persen.

Kartu Prakerja diharapkan dapat menjadi program pemberdayaan yang efektif tidak hanya di masa pandemi, tetapi juga setelah pandemi berakhir. Desain program sebagaimana tertuang dalam Perpres 36 tahun 2020 yang mengisyaratkan bahwa program Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Sasaran dari program Kartu Prakerja adalah pencari kerja baru (*skilling*) dan pencari kerja yang alih profesi atau korban PHK. Jumlah PHK mengalami kenaikan sebesar 2,67 juta jiwa di masa pandemi (Badan Pusat Statistik, 2020). Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun, penduduk usia 15-18 tahun tidak termasuk dalam target. Melalui mekanisme ini, penerima manfaat dapat memilih jenis, tempat, dan waktu pelatihan melalui platform digital yang bekerja sama dengan pelaksana program. Pelatihan dapat dilaksanakan secara daring maupun tatap muka. Penyedia pelatihan merupakan lembaga pelatihan sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Kartu Prakerja juga menyasar para pelaku UMKM. UMKM termasuk ke dalam sektor yang harus menanggung beban pandemi cukup signifikan. Menurut Febrantara (2020), dampak pandemi kepada UMKM dapat dilihat dari sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, kemampuan produksi UMKM menurun akibat isu kesehatan pekerjanya. Hal ini diperparah dari sisi permintaan yang juga berkurang akibat ketidakmampuan masyarakat dalam membeli produk UMKM. Pertalian isu penawaran dan permintaan ini akhirnya membuat UMKM semakin kesulitan. Program Kartu Prakerja hadir dengan menyediakan insentif

serta pelatihan di bidang kewirausahaan bagi para pelaku UMK

Beberapa kajian mengenai program Kartu Prakerja telah dilakukan walau dalam jumlah yang masih sangat terbatas. Kajian Predianto, T., & Khoirurrosyidin, K. (2020) menemukan bahwa Kartu Prakerja memberikan akses seluas-luasnya bagi peserta untuk menekuni hal-hal baru, dari tidak terampil menjadi terampil. Melalui Kartu Prakerja, muncul harapan baru akan tumbuhnya minat masyarakat dalam pengembangan diri lebih lanjut.

Kajian dari Siregar, A. P., & Oktaviana, N. (2020) yang mencoba melakukan simulasi ralokasi anggaran program Kartu Prakerja menemukan bahwa akan ada sekitar 37.304 serapan tenaga kerja untuk satu musim tanam padi jika dilakukan relokasi anggaran secara lebih tepat pada program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja juga dianggap dapat secara efisien membantu masyarakat yang terkena PHK (Permata, C. Q. N., 2021), sebagaimana program ini menjadikan para korban PHK sebagai salah satu kriteria penerima manfaatnya.

Kartu Prakerja relatif belum banyak dikaji. Hal ini cukup wajar mengingat kebaruan dari program yang dicetuskan oleh pemerintah ini. Termasuk yang belum dikaji adalah bagaimana program Kartu Prakerja berjalan sebagai salah satu program pemberdayaan. Tulisan ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana program Kartu Prakerja sebagai salah satu bentuk program pemberdayaan seperti ditunjukkan dalam regulasi yang memayungi pelaksanaan program ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Studi literatur adalah upaya untuk menggali pengalaman dan pengetahuan yang ada sebelumnya tentang suatu topik yang menjadi pertanyaan penelitian. Ia bersandar dari pemahaman bahwa ilmu pengetahuan sesungguhnya adalah akumulasi dari kerja kolektif (*the review rests on principle that scientific research is a collective effort , one in which many researchers contribute and share results with one another*, Neuman 2014). Penulis juga menelusuri regulasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja, mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Koordinator, Keputusan Menteri, sampai kebijakan dan standar prosedur dari pelaksana program.

## **HASIL**

Program Kartu Prakerja mulai dijalankan pada tahun 2020. Merujuk pada Perpres 36 tahun 2020, Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Melalui program ini, peserta terpilih akan berhak mendapatkan pelatihan dan insentif (pasal 4). Pelatihan yang dimaksud mencakup pembekalan kompetensi kerja, peningkatan kompetensi kerja, serta alih kompetensi kerja. Selain pengembangan kompetensi kerja, program ini juga bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan sebagaimana tertuang dalam pasal I Perpres 76 tahun 2020 yang merevisi sebagian poin pada Perpres 36 tahun 2020. Kompetensi kerja yang dimaksud dalam program ini adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap

kerja. Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat menerima insentif dalam rangka meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup, serta pelaksanaan evaluasi efektivitas program Kartu Prakerja.

Sebagaimana disampaikan di atas, sasaran program ini adalah para pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah (termasuk pelaku usaha mikro/kecil). Untuk dapat menjadi peserta program Kartu Prakerja, peserta harus memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 3 yakni berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia paling rendah 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Program ini juga tidak dapat diikuti oleh pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, kepala dan perangkat desa, serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.

Untuk dapat menjadi penerima manfaat program, calon peserta harus mendaftarkan diri pada program Kartu Prakerja yang dilakukan secara daring melalui situs resmi program. Dalam situasi tertentu, pendaftaran program juga dapat dilakukan secara luring melalui kementerian/lembaga atau pemerintah daerah (Pasal I Perpres 76 tahun 2020). Setelah itu, akan dilakukan proses seleksi dengan menggunakan data kependudukan (dengan sinkronisasi data kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, dan/atau PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), serta memberikan prioritas kepada pendaftar tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja.

Setelah ditetapkan menjadi penerima manfaat program, para peserta akan mendapatkan saldo pelatihan sebesar satu juta rupiah yang dapat digunakan untuk membayar biaya pelatihan yang tersedia dalam ekosistem program Kartu Prakerja melalui beragam Platform Digital (PD) yang tersedia. Pada tahun 2020 sampai tulisan ini dibuat (April 2022), besaran pagu pelatihan adalah satu juta rupiah (Keputusan Menko Perekonomian Selaku Ketua Komite Cipta Kerja Nomor 219/2020). Dengan jumlah ini, para peserta dapat mengikuti pelatihan sebanyak apapun selama saldo pelatihannya masih cukup untuk membeli pelatihan-pelatihan yang ada. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta akan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan. Para peserta juga akan mendapatkan insentif yang besarnya disesuaikan oleh kementerian yang membidangi perekonomian dari waktu ke waktu.

Pelatihan yang diselenggarakan dalam ekosistem program Kartu Prakerja disediakan oleh Lembaga Pelatihan (LP) dapat diakses oleh calon peserta pada Platform Digital (PD), yakni badan usaha atau lembaga yang bertugas dalam menyediakan akses pilihan Pelatihan kepada peserta, yang ditetapkan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Pelatihan yang disediakan dalam ekosistem program Kartu Prakerja harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat tayang dan diikuti oleh peserta. Kriteria dan ketentuan detail mengenai hal tersebut diatur oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dalam Dokumen Standar Kualitas Pelatihan (Masa Transisi), antara lain:

- a. Durasi penyampaian materi minimal 6 jam
- b. Pelatihan ditujukan untuk mengembangkan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh industri dengan mengacu kepada Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia dan Indotask

- c. Pelatihan bersifat interaktif yang dapat mengetahui respon peserta terhadap konten belajar yang dikonsumsi
- d. Konten belajar diatur sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan peserta mengonsumsi materi yang disediakan (antara lain dengan menonaktifkan fitur percepat pemutar video)
- e. Menyediakan sesi konsultasi yang dapat diikuti oleh peserta dalam memperdalam pengetahuan yang didapatkan melalui materi belajar yang disediakan
- f. Menggunakan setidaknya 3 metode ajar, dengan minimal mencakup kuliah/ceramah dan demonstrasi/peragaan
- g. Diajarkan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pelatihan, ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi atau pun bukti pengalaman kerja yang sesuai

Setelah mengikuti pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat yang menjelaskan hasil pelatihan yang telah diikuti. Sertifikat mencakup informasi mengenai judul pelatihan, penyelenggara pelatihan, serta daftar kompetensi kerja yang dikembangkan pada program pelatihan yang diikuti. Peserta selanjutnya harus memberikan ulasan dan penilaian terhadap pelatihan yang telah diikuti sebelum akhirnya dapat menerima insentif biaya mencari kerja. Selain insentif biaya mencari kerja, pemerintah juga menyediakan insentif pengisian survei evaluasi. Terdapat 3 survei yang dibuat oleh Manajemen Pelaksana untuk mengukur efektivitas program. Atas tiap pengisian survei, peserta akan mendapatkan insentif pengisian survei.

## **PEMBAHASAN**

Pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses dan juga tujuan (Edi dalam Horista, K. M. N., & Rahayu, E. (2022). Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Melalui proses pemberdayaan, subjek didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri (Khiftiyah, M., & Nilamsari, W. (2022). Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada situasi akhir dari proses, yakni masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan dan pengetahuan, serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

Secara umum, Ife (2003) menyebut pemberdayaan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan (*power*) dari kelompok yang kurang beruntung (*the disadvantaged*). Kekuatan yang dimaksud berwujud dalam setidaknya 7 hal, yakni kekuatan untuk membuat pilihan pribadi, kekuatan untuk menentukan kebutuhan, kekuatan untuk berpikir (dengan beragam referensi yang dipilih), kekuatan untuk menghadapi institusi sosial, kekuatan untuk mengakses dan memanfaatkan sumberdaya, kekuatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, dan kekuatan untuk mengendalikan reproduksi. Situasi ‘kurang beruntung’ dapat terjadi pada setidaknya 3 dimensi; kelas, gender, dan ras (Ife, 2003). Bentuk lain situasi ini antara lain kelompok miskin, penduduk asli, termasuk pengangguran. Merujuk pada pendapat Ife di atas, program Kartu Prakerja berusaha memberikan ‘kekuatan’ kepada kelompok penerima manfaat melalui pengembangan kompetensi kerja yang dilakukan dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan dalam ekosistem. Harapannya, setelah mengikuti serangkaian pelatihan yang tersedia maka peserta dapat bersaing dan memiliki pilihan yang

lebih luas dalam pasar tenaga kerja.

Terdapat 3 strategi untuk mencapai pemberdayaan seperti dikemukakan Ife (2013). Pertama, kebijakan dan perencanaan yang dicapai melalui perubahan dan pengembangan struktur untuk menghadirkan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, aksi sosial dan politik. Ketiga, pendidikan dan peningkatan kesadaran untuk meningkatkan kekuatan pada subjek pemberdayaan. Pemberdayaan melalui kebijakan dilakukan dengan mengubah struktur dan lembaga untuk menghadirkan akses terhadap sumber daya yang lebih adil dan kesempatan untuk terlibat dalam komunitas (Ife, 2003). Termasuk dengan membuat kebijakan afirmatif yang dapat memberikan ruang kesempatan lebih besar kepada kelompok kurang beruntung. Kebijakan ekonomi dalam pengurangan angka pengangguran juga dapat dilihat sebagai upaya pemberdayaan. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan, keahlian, dan pengetahuan sehingga peserta mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki (Agung Cahyanto dan Ety Rahayu, 2015). Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik menekankan peran aktivis dalam memberikan kemampuan bagi subjek pemberdayaan untuk menjadi lebih efektif dalam arena politik. Sementara pemberdayaan melalui pendidikan dan pembangunan kesadaran dilakukan dengan serangkaian proses edukatif untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan

Merujuk pada Ife di atas, program Kartu Prakerja dapat dilihat sebagai salah satu upaya pemberdayaan angkatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan pelatihan dan insentif yang disediakan, diharapkan peserta dapat memiliki kekuatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi melalui pekerjaan yang layak. Kelas-kelas pengembangan kompetensi kerja yang berbasis Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia serta Indotask dapat membantu peserta dalam memiliki keterampilan kerja yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja.

Program Kartu Prakerja menasar kelompok kurang beruntung yakni para pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah (termasuk pelaku usaha mikro/kecil). Sebagai bagian dari seleksi, program Kartu Prakerja melakukan sinkronisasi status ekonomi dan pendidikan bersama dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT ASABRI, dan PT Taspen (untuk mengkonfirmasi status kebjkerjaan serta upah peserta), serta data pada kementerian pendidikan & kebudayaan dan pendidikan tinggi.

Dari 3 strategi pemberdayaan seperti dikemukakan di atas, maka dilihat bahwa program Kartu Prakerja mencoba menggunakan strategi pertama yakni melalui kebijakan program Kartu Prakerja. Kebijakan yang dimaksud setidaknya terdapat pada 2 level, yakni pada level kebijakan umum di mana program Kartu Prakerja hadir sebagai upaya untuk mendukung kesiapan angkatan kerja, dan kedua pada level kebijakan pelaksanaan di mana program Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja memberikan kebijakan afirmatif untuk mendorong keterlibatan korban PHK sebagai peserta program. Sementara pelatihan yang dimaksud adalah seluruh pilihan kelas pelatihan yang diikuti oleh peserta yang dapat membantu mereka mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja sesuai dengan kerangka pengembangan ketenagakerjaan di Indonesia.

## PENUTUP

Temuan penelitian melalui telusuran regulasi yang mengatur pelaksanaan program menunjukkan bahwa program Kartu Prakerja mencoba menghadirkan pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan program seperti disebut Ife. Program ini dijalankan dengan menysar jumlah penerima manfaat yang mencapai jutaan peserta melalui dua manfaat utama yakni pelatihan dan insentif. Dengan pemberdayaan yang dilakukan ini, diharapkan para alumni program dapat menjadi bagian dari angkatan kerja produktif Indonesia sesuai dengan tujuan dilaksanakannya program ini. Salah satu elemen kunci dalam pemberdayaan angkatan kerja melalui program Kartu Prakerja ini adalah pada tahap pelaksanaan pelatihan. Untuk itu diperlukan penelitian lanjutan untuk melihat proses pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang tersedia dalam ekosistem Kartu Prakerja.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2020). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen. bps.go.id. Diakses pada 23 April 2022.
- Barany, L. J., Simanjuntak, I., Widia, D. A., & Damuri, Y. R. (2020). Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjangkau Sesuai Sasaran. Centre for Strategic and International Studies.  
[https://www.csis.or.id/download/243-post-2020-04-15-CSIS\\_Commentaries\\_ECON\\_002\\_ID\\_Damuri\\_EtAl.pdf](https://www.csis.or.id/download/243-post-2020-04-15-CSIS_Commentaries_ECON_002_ID_Damuri_EtAl.pdf) diakses pada 24 April 2022.
- Cahyanto, A., & Rahayu, E. (2015). Evaluasi Program Penguatan Perempuan Usaha Kecil (PUK)(Evaluasi Sumatif terhadap Program Penguatan PUK yang Dilakukan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil di Solo). *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, 16(1).  
<http://jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/jiks/article/view/66> diakses pada 26 April 2022.
- Chae, C., & Chung, J. (2009). Pre-employment vocational education and training in Korea. World Bank.  
<https://web.worldbank.org/archive/website01507/WEB/IMAGES/0921.PDF> diakses pada 23 April 2022.
- Consuello, Y. (2020). Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19. 'ADALAH, 4(1).  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15479>.
- Creswell, J. W. (2002). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*. Jakarta: KIK Press.
- Febrantara, D. (2020). Bagaimana Penanganan UKM di Berbagai Negara Saat Ada Pandemi Covid-19? DDTC Fiscal Research.
- Horista, K. M. N., & Rahayu, E. (2022). PROGRAM PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PETANI PESISIR DROMPAK LAUT SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1), 11. <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol3/iss1/17/> diakses pada 26 April 2022.
- Khiftiyah, M., & Nilamsari, W. (2022). PROSES PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI

- PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1), 13. <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol3/iss1/7/> diakses pada 23 April 2022.
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., & Setiawan, R. (2020). Implementation Processes of Social Protection Policy in Indonesia: Study of Prakerja Card Program. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(3). <https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/10595> diakses pada 24 April 2022.
- Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (2020). Kumpulan Regulasi Program Kartu Prakerja.
- Nasrah, H., Irdyanti, I., Nesneri, Y., & Hidayati, F. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PEKANBARU. *Jurnal EL-RIYASAH*, 11(2), 119-138. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasaah/article/view/11699> diakses pada 27 April 2022.
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212-224. <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/benefita/article/view/5313> diakses pada 23 Maret 2022.
- Neuman, W. L. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Permata, C. Q. N. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN KARTU PRA KERJA TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK UNTUK MENANGGULANGI PENGANGGURAN DI INDONESIA. *jurnalretrieval*, 1(1), 58-68. <https://jurnalretrieval.hukum.uns.ac.id/index.php/jurnalretrieval/article/view/5> diakses pada 25 April 2022.
- Prasetyo, Adhi S.W. dan Ollani Vabiola Bangun. (2019). Urgensi dan Tantangan Kartu Pra Kerja. Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-89.pdf> diakses pada 23 Maret 2022.
- Predianto, T., & Khoirurrosyidin, K. (2020). Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 3(2), 115-127. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjgops/article/view/1175/575> diakses pada 24 Maret 2022.
- Rahayu, E. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Pengurus Koperasi Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, 19(1). <http://jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/jiks/article/view/97> diakses pada 27 April 2022.
- Rawie, Y., & Samputra, P. L. ANALISIS COST AND EFFECTIVITY PROGRAM KARTU PRAKERJA DI INDONESIA. *GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 5(2), 118-139. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/gp/article/view/32539> diakses pada 25 April 2022.
- Siregar, A. P., & Oktaviana, N. (2020). REALOKASI KARTU PRA KERJA DALAM Mendukung Intensifikasi Sektor Pertanian. *AGRISAINTELIKA: Jurnal*

- Ilmu-Ilmu Pertanian, 4(1), 1-13. <http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/agrisaintifika/article/view/843> diakses pada 25 April 2022.
- Van Gerven, M., & Beckers, M. (2009). Unemployment protection reform in Belgium, Finland, the Netherlands, and the UK. *Changing European Employment and Welfare Regimes: The influence of the open method of coordination on national reforms*, 12, 61.
- Wijayanti, R. I., & Humardhiana, A. (2020). Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 109-122. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/dimasejati/article/view/6645> diakses pada 22 April 2022.